

**CIREBON MASA PENDUDUKAN JEPANG  
(1942 – 1945)**

**MAKALAH**

Disajikan dalam Seminar Rencana Penyusunan Buku Sejarah Cirebon  
Diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat  
dan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon  
pada hari Rabu, 12 Agustus 2009 di Hotel Apita Green Cirebon

oleh

Mumuh Muhsin Z.

**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAWA BARAT  
BANDUNG  
2009**

## **CIREBON MASA PENDUDUKAN JEPANG (1942 – 1945)**

Oleh:

Mumuh Muhsin Z.<sup>1</sup>

### **Abstrak**

Indonesia berada pada zaman pendudukan balatentara Jepang selama tiga setengah tahun. Meskipun waktu ini cukup singkat tapi cukup berakibat sangat menyengsarakan rakyat Indonesia. Singkatnya masa pendudukan ini berpengaruh terhadap historiografi sejarah Indonesia pada periode ini. Tulisan sejarah pada periode ini, lebih-lebih untuk sejarah lokal, termasuk Cirebon, masih sangat sedikit. Penelitian tentang Cirebon pada masa pendudukan Jepang dilakukan dalam rangka mengisi kelangkaan historiografi periode tersebut.

### **Pengantar**

Secara metodologis dikenal istilah sejarah kontemporer dan sejarah lokal. Sejarah kontemporer adalah sejarah yang jarak antara penulisan dan peristiwa yang jadi objek penulisannya tidak terlalu jauh, sehingga para pelaku sejarah dan saksi sejarahnya masih hidup. Adapun sejarah lokal – sering dikontraskan dengan sejarah nasional – adalah sejarah yang ruang lingkup spasial kajiannya terbatas pada *scope* lokal. Cirebon zaman Jepang bisa dikategorikan sebagai sejarah kontemporer dan sejarah lokal.

Sejarah Indonesia zaman Pendudukan Jepang sudah banyak diungkap. Akan tetapi sejarah lokal pada periode tersebut belum banyak dikerjakan. Demikian pula

---

<sup>1</sup> Staf pengajar Jurusan Sejarah Fak. Sastra Universitas Padjadjaran dan Ketua Umum Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Cabang Jawa Barat.

halnya dengan Cirebon. Akibatnya adalah terdapat kesulitan untuk mendapatkan sumber-sumber sekunder yang memberikan informasi memadai tentang kondisi Cirebon zaman Pendudukan Jepang dengan beragam dinamika lokalnya.

Alternatif yang bisa dilakukan untuk mengungkap Cirebon zaman Pendudukan Jepang adalah melalui sumber-sumber primer seperti surat-surat kabar sezaman, terutama surat kabar lokal. Selain itu perlu dilakukan juga wawancara dengan pelaku dan saksi sejarah melalui metode wawancara sejarah lisan. Tentu saja membuka arsip-arsip pemerintahan Cirebon zaman Pendudukan Jepang pun wajib dilakukan.

Dengan demikian, uraian pada makalah ini sesungguhnya tidak dimaksudkan untuk menguraikan masalah substantif mengenai gambaran Cirebon periode Pendudukan Jepang. Akan tetapi lebih dimaksudkan untuk mendapatkan *input* dan menjangar informasi untuk kelengkapan penulisan Cirebon periode tersebut.

### **Masuknya Jepang ke Cirebon dan Sambutan Masyarakat**

Pada awal tahun 1940-an terjadi perubahan politik di Cirebon. Sejak Maret 1942 militer Jepang mengambil alih Cirebon dari pihak Belanda. Perubahan politik ini terjadi berkait dengan situasi perpolitikan di tingkat internasional. Pada tanggal 8 Desember 1941 terjadi Perang Asia-Pasifik antara Sekutu (gabungan tentara Amerika Serikat, Inggris, Belanda, dan Perancis) melawan Jepang. Dalam perang ini Jepang berhasil menguasai kawasan Asia Tenggara (Birma, Malaysia, Filipina, dan Hindia Belanda [Indonesia]). Peristiwa menyerahnya Pemerintah Hindia Belanda kepada Balatentara Jepang terjadi pada tanggal 8 Maret 1942 di Pangkalan Udara Militer Belanda di Kalijati Subang. Penyerahan itu ditandai dengan penandatanganan oleh kedua pihak; pihak Pemerintah Hindia Belanda diwakili oleh Letnan Jenderal Ter Poorten dan pihak Jepang diwakili oleh Letnan jenderal Hitosyi Imamura.

Pasukan Jepang yang menyerbu Jawa Barat ialah Staf Tentara Keenambelas dan Divisi II. Mereka mendarat pada tanggal 1 Maret 1942 di dua daerah, yaitu di daerah Banten (di kota kecil Bojonegara, dekat Merak, dan di Teluk Banten) dan di Eretan Wetan (daerah Cirebon).<sup>2</sup> Pasukan yang mendarat di Eretan Wetan ialah Detasemen Syoji. Pada hari itu juga mereka berhasil menduduki Subang di mana Batalyon Wakamatsu dapat merebut lapangan terbang Kalijati tanpa perlawanan berarti dari Angkatan Udara Inggris yang menjaga lapangan terbang itu.<sup>3</sup>

Sementara ini belum diperoleh informasi kapan dan bagaimana persisnya tentara Jepang masuk ke Cirebon. Namun demikian, patut diduga bahwa tentara Jepang masuk ke Cirebon tidak lama setelah terjadi peristiwa menyerahnya Pemerintah Hindia Belanda tanpa syarat kepada Balatentara Jepang tanggal 8 Maret 1942. Dugaan ini didasarkan pada faktor geografis, jarak antara Kalijati (Subang) dengan Cirebon itu relatif dekat, juga arti strategis Cirebon yang memiliki pelabuhan dan berbatasan dengan Jawa Tengah.

Sambutan masyarakat Cirebon terhadap kedatangan Balatentara Jepang tidak jauh berbeda dengan masyarakat di daerah-daerah lainnya. Umumnya mereka menyambutnya dengan kegembiraan. Setidaknya, hal tersebut disebabkan oleh dua hal, internal dan eksternal. Faktor internal adalah kondisi masyarakat sendiri yang merasa sudah terlalu lama berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda dengan segala dukanya. Faktor eksternal adalah dari pihak Jepang sendiri yang melalui berbagai propogandanya menamakan diri sebagai “saudara tua”, “pelindung”, “penyelamat”, dan sebagainya yang ingin membebaskan “saudara mudanya” dari cengkeraman penindasan penjajah berkulit putih.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Makmun Salim. 1971. *Ichtisar Sedjarah Perang Dunia II*. Djakarta: Pusat Sedjarah ABRI, hlm. 144; Nugroho Notosusanto, “Djepang kontra Belanda di Djawa Barat dalam Perang Dunia II”, *Intisari*, 78, 7 Djanuari 1970, hlm. 89.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Keberhasilan upaya propaganda Jepang dilakukan secara intensif dan teratur. Sejak tahun 1929, ketika terjadi depresi ekonomi di Hindia Belanda produk-produk Jepang membanjiri Indonesia yang berkualitas baik dan murah. Pada awal tahun 1930-an banyak bermunculan toko, studio foto, dan tukang cukur milik orang Jepang. Di antar mereka ada yang bertindak sebagai mata-mata (spionase);

## **Cirebon di Bawah Pemerintah Pendudukan Jepang**

Menyerahnya Pemerintah Hindia Belanda kepada Balatentara Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati Subang berarti berakhirnya pemerintahan Kolonial Belanda. Untuk menjaga ketertiban dan mengatur pemerintahan, Pendudukan Militer Jepang membagi wilayah bekas Hindia Belanda menjadi dua bagian pemerintahan, yaitu:

1. Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Madura yang berada di bawah kekuasaan pemerintah militer Angkatan Darat (*Rikugun*). Di dalamnya dibagi lagi atas dua daerah pemerintahan, yaitu:
  - (1) Pulau Sumatera di bawah kekuasaan Tentara ke-23 yang berkedudukan di Bukittinggi,
  - (2) Pulau Jawa dan Madura di bawah kekuasaan Tentara ke-16 yang berkedudukan di Jakarta.
2. Pulau Kalimantan dan wilayah Timur Besar yang berada di bawah kekuasaan pemerintahan militer Angkatan Laut (*Kaigun*) dan berkedudukan di Makasar.

Dalam menjalankan kebijakannya, penguasa militer Jepang berpegang pada beberapa prinsip utama, yaitu:

- 1) Mengusahakan agar mendapat dukungan rakyat (untuk memenangi perang) dan mempertahankan ketertiban umum;
- 2) Memanfaatkan sebanyak mungkin struktur pemerintahan yang sudah ada;
- 3) Meletakkan dasar agar wilayah yang bersangkutan dapat memenuhi kebutuhan penduduknya sendiri.

---

periksa Nugroho Notosusanto. 1979. *Tentara Peta pada Zaman Pendudukan Jepang di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, hlm. 14.

Panglima Tentara ke-16 yang pertama di Pulau Jawa ialah Letena Jenderal Imamura Hitoshi dengan kepala stafnya Mayor Jenderal Seizaburo Okazaki. Mereka ditugasi membentuk pemerintahan militer sementara di Jawa. Pemerintahan militer tingkat pusat dinamakan *Gunseikanbu*; sedangkan pemerintahan militer setempat (daerah) disebut *Gunseibu*,<sup>5</sup> yang dibentuk di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan pusatnya masing-masing di Bandung, Semarang, dan Surabaya.

Di wilayah Jawa Barat terdapat pemerintahan *Gunseibu* dengan tempat kedudukan pemimpinnya di Bandung. Yang diangkat menjadi Kepala *Gunseibu* (Gubernur) Jawa Barat ialah Kolonel Matsui. Ia diwakili seorang wakil berbangsa Indonesia, yaitu R. Pandu Suradiningrat dan Atik Suardi sebagai pembantu wakil gubernur.

Pada tanggal 29 April 1942 diangkat empat orang menjadi residen di wilayah Jawa Barat, yaitu:

- (1) R.A.A. Hilman Jayadiningrat sebagai residen Banten berkedudukan di Serang.
- (2) R.A.A. Suyajayanagara sebagai residen Bogor berkedudukan di Bogor.
- (3) R.A.A. Wiranatakusumah sebagai residen Priangan berkedudukan di Bandung.
- (4) Pangeran Aria Suriadi sebagai residen Cirebon berkedudukan di Cirebon.

Pemerintah militer sementara itu berlangsung hingga bulan Agustus 1942. Pada bulan tersebut dikeluarkan Undang-Undang No. 27 dan No. 28 yang mengakhiri eksistensi *Gunseibu*. Berdasarkan Undang-Undang No. 27, struktur pemerintahan militer di Jawa dan Madura terdiri atas *Gunsyireikan* yang membawahi *syucokan* (residen) dan dua *kotico* (kepala daerah istimewa). Di bawah *syucokan* adalah *kenco* (bupati) dan *syico* (walikota). Di bawah *kenco* adalah *gunco* (wedana); di bawah *gunco* adalah *sonco* (camat), dan di bawah *sonco* adalah *kunco* (kepala desa).

Di wilayah Jawa Barat terdapat lima *syucokan*, yaitu Syucokan Banten, Jakarta, Bogor, Priangan, dan Cirebon. Sejak itu jabatan *syucokan* (residen) dipegang

---

<sup>5</sup> *Gunseibu* setara dengan propinsi pada masa sebelum perang.

oleh orang Jepang. Beberapa di antaranya adalah Onokuchi, Matsui, Ichibangase, masing-masing sebagai residen untuk Banten, Priangan, dan Cirebon.

Cirebonsyu dikepalai oleh Syucokan Ichibangase; wilayahnya meliputi kabupaten-kabupaten Cirebon, Kuningan, Indramayu, dan Majalengka. Sejak 1 Desember 1944 Ichibangase diganti oleh R.M.A.A. Suriatanubrata. Adapun para bupati yang memerintah Cirebonsyu waktu itu adalah:

- 1) Di Kuningan: R. Umar Said (1940 – 1942) dan Rifai (1942 – 1945);
- 2) Di Majalengka: R.M.A. Suriatanubrata (1922 – 1944) dan R.A. Umar Said (1944 – 1945);
- 3) Di Indramayu: R.A.A. Moh. Sediono (1933 – 1944) dan Dr. Mujani (1944 – 1945).

## **Penutup**

Pada masa Pendudukan Jepang, Cirebon memiliki status sebagai *syu* (keresidenan), sehingga ada Cirebon Syu (Keresidenan Cirebon); juga sebagai *ken* (kabupaten) dan seterusnya sampai pemerintahan yang lebih rendah (*gun*, *son*, dan *ku*). Dengan status pemerintahan seperti itu menjadi isyarat betapa penting dan berartinya Cirebon pada masa Pendudukan Jepang. Dinamika sosial, ekonomi, politik, militer, dan sebagainya pasti banyak terjadi di wilayah ini.

Mengungkap Cirebon masa Pendudukan Jepang ini cukup mendesak untuk dilakukan, karena bersaing dengan keberadaan para pelaku dan saksi sejarah yang semakin sedikit.

## Daftar Sumber

- Akyas D.S., M. *et al.* 2006.  
*Perjuangan Rakyat Kuningan Masa Revolusi Kemerdekaan*. Bandung: Kiblat.
- Ekadjati, Edi S. *et al.* 1981/1982.  
*Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jawa Barat*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Lubis, Nina H. *et al.* 2003.  
*Sejarah Tatar Sunda*. Jilid 2. Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran.
- Nugroho Notosusanto,  
“Djepang kontra Belanda di Djawa Barat dalam Perang Dunia II”, *Intisari*, 78,  
7 Djanuari 1970, hlm. 89.
- , 1979.  
*Tentara Peta pada Zaman Pendudukan Jepang di Indonesia*. Jakarta:  
Gramedia.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto ed. 1993.  
*Sejarah Nasional Indonesia*. Jilid VI. Jakarta: Balai Pustaka.
- Salim, Makmun. 1971.  
*Ichtisar Sedjarah Perang Dunia II*. Djakarta: Pusat Sedjarah ABRI.
- Sjafrudin, Ateng *et al.* 1993.  
*Sejarah Pemerintahan di Jawa Barat*. Bandung: Pemda Provinsi Jawa Barat.